

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentulah diperlukan sebuah kajian literatur/literatur review. Sebuah penelitian pada dasarnya bukanlah mutlak sebuah penelitian yang baru namun merupakan penelitian lanjutan guna menyempurnakan penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan oleh seorang penulis atau peneliti guna untuk dilanjutkannya penelitian tersebut atau digunakan sebagai referensi atau acuan bagi seorang peneliti. Menyadari hal tersebut, penulis perlu untuk melakukan literatur review atau kajian literatur guna dapat dijadikan sebagai acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang sedang penulis teliti.

Dalam literatur review, terdapat berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Dalam upaya menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi yang terjadi di hutan hujan Amazon serta kaitannya dengan rantai pasok guna memenuhi kebutuhan produksi industri fast fashion Amerika Serikat dan dampak yang diberikan akibat dari aktivitas tersebut. Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan referensi dalam upaya membahas dan menganalisa penelitian ini. Referensi yang digunakan bersumber dari buku, artikel jurnal, juga laporan-laporan yang diterbitkan oleh Lembaga atau Organisasi Internasional.

Literatur pertama yang penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini adalah merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Rainforest Foundation Norway yang berjudul **Driving Deforestation: The European Automotive Industry's Contribution to Deforestation in Brazil** (Rainforest Foundation Norway, 2021). Dalam laporan tersebut menjelaskan mengenai rantai pasokan kulit dari peternakan sapi sampai dengan aplikasi akhirnya khususnya dalam industri otomotif. Rantai pasokan kulit tidak hanya melibatkan penyamakan kulit, produsen produk akhir dan konsumen akhir namun juga mencakup produsen sapi, rumah potong hewan dan produsen khusus. Kulit sapi berbagi dengan rantai pasokan daging sapi yang dimulai dari pembiakan hewan dan penggemukan hingga penyembelihan. Selama ini system yang digunakan guna melacak rantai pasokan hanya terbatas pada pemasok langsung sedangkan deforestasi sebagian besar terjadi di pemasok tidak langsung. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa setidaknya ada dua kali lipat jumlah pemasok tidak langsung dibandingkan dengan pemasok langsung dan deforestasi yang terjadi 2,5 kali lebih banyak dibandingkan pemasok langsung yakni rumah pemotongan hewan. Dari laporan ini penulis mengambil pembahasan dibagian pertama. Dibagian pertama atau bab pertama dalam laporan tersebut menganalisis dari sisi negara Brazil yakni rantai pasokan kulit, yang pertama menghubungkan distribusi kawanan ternak dan penyamakan kulit didalam wilayah nasional dengan produksi berbagai jenis kulit yang di ekspor. Studi ini kemudian membahas paparan deforestasi penyamakan kulit yang memiliki tendensi berkaitan dengan rumah pemotongan hewan yang beroperasi di Legal Amazon, sebuah area yang mencakup Sembilan negara bagian Brazil,

termasuk seluruh bioma Amazon, bagian dari bioma Cerrado dan zona transisi diantara keduanya. Dalam laporan ini berfokus pada penyamakan kulit yang dilakukan oleh tujuh perusahaan yang termasuk kedalam 10 besar eksportir kulit sapi Brazil: JBS Couros, Minerva Couros, Fuga Couros, Durlicouros, Mastroiro Brazil, dan Viposa.

Selanjutnya, literatur yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Kartika Yustika Mandala Putri yang berjudul **Diplomasi Greenpeace Dalam Menekan Deforestasi Amazon** (Putri, 2016). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana upaya Greenpeace dalam melawan deforestasi yang terjadi di hutan hujan Amazon melalui upaya moratorium kedelai yang disepakati pada tanggal 24 Juni tahun 2006. Moratorium ini disepakati secara sukarela sebagai sebuah komitmen yang ditanda tangani oleh industri dan anggota eksportir Brazilian Vegetable Oil Industries Association (ABIOVE) dan National Grain Exporters Association (ANEC). Namun kesepakatan ini bukan hanya disepakati secara sukarela oleh sector-sektor swasta saja, namun inisiatif ini juga mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil lainnya.

Terdapat tiga hal signifikan yang dilakukan oleh Greenpeace yakni sebagai competitor pemerintah, mobilisasi opini masyarakat, serta pengawas dan penilai. Semangat Greenpeace untuk menyuarakan permasalahan deforestasi di hutan Amazon bukan berarti pemerintah Brazil tidak melakukan kebijakan terkait deforestasi. Pada tahun 2004 diluncurkan sebuah kebijakan oleh Pemerintah Brazil, yaitu Rencana Tindakan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penebangan Hutan di Legal Amazon (PPCDAm). Kebijakan

pemerintah Brazil tersebut lebih berfokus pada kekuatan yang berpusat, tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan terhadap permasalahan deforestasi yang terjadi di hutan Amazon. Greenpeace telah melakukan investigasi mengenai hutan Amazon semenjak tahun 1998 dengan melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas lokal di Amazon. Menurut kaca mata Greenpeace bahwa kebijakan tersebut kurang mampu untuk menghambat laju deforestasi di Amazon. Respon yang dikeluarkan oleh Greenpeace tidak berbentuk protes, melainkan berbentuk laporan investigasi. Greenpeace melihat urgensi pelestarian Amazon agar mendapatkan perhatian melalui fakta-fakta bahwa Amazon sedang dalam keadaan yang berbahaya. Selanjutnya peran Greenpeace yakni adalah memobilisasi opini public. Greenpeace merupakan salah satu NGO yang aktif melakukan kampanye. Melalui media rilisnya, Greenpeace menyampaikan untuk terus memperjuangkan Zero Deforestation agar dapat mencegah perubahan iklim katastrofik. Advokasi Greenpeace dalam rangka mobilisasi opini publik bersifat komprehensif karena tidak hanya melibatkan dukungan dari masyarakat dan konsumen tetapi juga dari produsen lokal. Mobilisasi opini publik yang dilakukan oleh Greenpeace merupakan perpanjangan dari aksi protes NGO lokal yang tidak dapat menyampaikan kepentingannya. Lalu peran Greenpeace yang selanjutnya adalah sebagai pengawas negosiasi moratorium kedelai dan kepatuhan pemerintah dalam pelestarian hutan Amazon. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan mengawasi luas hutan dan melibatkan masyarakat lokal yang digerakkan oleh Greenpeace berdasarkan asas self-belonging. Upaya Greenpeace ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Moratorium

Kedelai memang benar dilaksanakan dan terdapat kerjasama antar aktor yang saling mengawasi.

Selanjutnya, literatur yang juga penulis jadikan acuan adalah sebuah jurnal yang berjudul **The Global Environmental Injustice of Fast Fashion** (Bick et al., 2018). Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa pakaian yang diproduksi massal atau banyak dan dijual dengan harga yang murah, fast fashion muncul sebagai konsep bisnis yang sangat dominan saat ini, sehingga konsumsi produk garment mengalami peningkatan. Fast fashion selalu disuarakan sebagai bentuk demokratisasi terhadap mode dimana model-model baru yang tersedia adalah tercipta untuk semua kelas konsumen. Namun resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang berkaitan erat dengan pakaian yang murah tersebut tersembunyi disetiap siklus hidup sebuah pakaian. Setiap Langkah rantai pasok produk fast fashion telah menciptakan sebuah dilemma terhadap keadilan lingkungan global. Sementara itu, fast fashion menawarkan kepada konsumen untuk membeli lebih banyak lagi pakaian dengan harga yang murah, tanpa memperhatikan mereka yang hidup dekat dengan tempat produksi atau bekerja ditempat produksi pakaian tersebut menanggung kerugian dari bahaya kesehatan lingkungan. Hal ini terutama berlaku bagi negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah karena banyak dari limbah ini berakhir di pasar pakaian bekas. Negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah, cenderung kurang mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menegakan perlindungan terhadap lingkungan pekerjaan untuk demi melindungi kesehatan manusia. Fast fashion mendorong peningkatan terhadap produksi pakaian murah dengan menekan

cost dan mengalihkan produksi ke negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah.

2.2 Kerangka Teoritis

Dalam upaya memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran guna memperkuat analisa yang didasarkan pada teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Teori dan konsep yang dicetuskan oleh para ahli menjadi sebuah landasan pemikiran bagi penulis untuk mengkaji penelitian ini.

Studi Hubungan Internasional mulai mengalami perkembangan pasca Perang Dunia I dan menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1919. Sejak saat itu, studi Hubungan Internasional berkembang bukan hanya ke seluruh Eropa saja, namun juga ke Amerika Serikat serta ke negara-negara lain seperti kawasan Amerika Latin, Asia, serta Afrika (Hadiwinata, 2017). Seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan lain sebagainya, hubungan internasional juga merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia didalam konteks hubungan antar actor yang melintasi batas-batas negara. Awalnya, kajian dalam studi hubungan internasional hanya berfokus pada isu perang dan damai atau sering disebut dengan isu *High Politics*. Namun pada awal decade 1990-an, Andrew Linker menghidupkan sebuah Teori Kritis (Critical Theory) dengan bersandar pada konsep-konsep Marxis seperti internasionalisme, materialism sejarah, emansipasi, dan posisi hubungan internasional sebagai sebuah ilmu harus digunakan bagi kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah teori kritis dan konsep-konsep Marxisme ikut mendorong perluasan lingkup

isu dalam studi hubungan internasional, terutama pasca terjadinya perang dingin, dengan mulai merambah pada isu-isu non-tradisional seperti kemiskinan global, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, perdagangan manusia, kesetaraan gender, penyakit menular, pengungsi, dan lain sebagainya yang melibatkan actor-aktor non-state seperti NGOs, Gerakan social, aliansi masyarakat sipil, dan individu internasional (Hadiwinata, 2017).

2.2.1 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional menjadi salah satu isu dalam studi hubungan internasional. Secara umum, ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam system internasional. Ekonomi politik internasional secara sederhana dapat diartikan juga sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi (Perwita & Yani, 2017). Kemudian Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of International Relations* mendefinisikan sebuah konsep ekonomi-politik sebagai suatu dinamika interaksi global antara pengerjaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi). Dalam definisi ini terlihat bahwa ada hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi (Gilpin, 2016). Negara dan pasar saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2017). Pandangan tersebut memberikan sebuah arti bahwa teori

ekonomi politik bukanlah merupakan teori ekonomi yang murni, maksudnya adalah bukan hanya melulu membahas ekonomi secara teknis, dan juga teori politik bukan merupakan teori politik yang murni yang melihat ekonomi selalu bersifat politis. Namun jauh daripada itu ekonomi politik internasional menjelaskan mengenai berbagai kaitan antara factor ekonomi dan politik, kemudian pasar dan negara dalam ruang lingkup internasional (Maiwan, 2015).

Dalam ekonomi politik internasional terdapat sub bahasan yang berkembang dari disiplin ilmu ekonomi politik internasional yakni tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang melintasi batas-batas negara yang mencakup kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional memberikan manfaat secara langsung terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan domestic suatu negara dikarenakan negara tersebut tidak bisa memproduksinya sendiri. Disamping hal tersebut, perdagangan internasional juga memiliki beberapa tujuan lain, diantaranya:

1. Memperluas pasar dan meningkatkan produksi.
2. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor barang/produk.
3. Memajukan pertumbuhan sector ekonomi negara, menjaga kestabilan harga, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja.
4. Modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi (Bonaraja Purba, 2021).

Hal yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi yakni perdagangan bahwa adanya keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara yang

melakukannya, ketika mereka menjual barang dan jasa satu sama lain, pertukaran ini hampir selalu menguntungkan mereka bersama (Krugman, Paul R. Melitz, 2018). Pada hakikatnya, perdagangan internasional terjadi karena tidak ada satu negarapun yang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan domestic akan barang dan jasa. Kemudian perdagangan internasional muncul sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang bersaing. Teori perdagangan internasional dari kaum klasik dipelopori oleh Adam Smith. Kemudian pada abad-abad selanjutnya banyak para penstudi ekonomi yang menyumbangkan pemikirannya. Namun pemikiran David Ricardo juga menjadi sangat penting bagi perkembangan teori perdagangan internasional.

2.2.2 Deforestasi dan Degradasi

Saat ini masalah lingkungan menjadi concern utama para pemimpin negara diseluruh dunia karena dampak yang diberikan sangatlah beragam dan dapat mengancam kehidupan di muka bumi. Deforestasi merupakan salah satu ancaman paling signifikan terhadap kesehatan ekosistem secara global, dengan konsekuensi keanekaragaman hayati, kualitas air, tanah, dan iklim serta penyediaan makanan, kayu, serat dan bahan bakar yang berkelanjutan. Pertanian komersial dan subsisten, pertambangan, perluasan infrastruktur dan perluasan perkotaan merupakan pendorong langsung dari deforestasi. Sedangkan kebakaran yang tidak terkendali penggembalaan

ternak di hutan, pengumpulan kayu bakar dan produksi arang merupakan pendorong dari degradasi hutan (Baumber, 2020). Konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain merupakan ciri yang melekat dalam sejarah peradaban manusia. Selama 8000 tahun terakhir, planet ini telah kehilangan 40% dari tutupan hutan aslinya. Menurut perkiraan, hutan tropis primer sebelumnya memiliki luas 1600×10^6 ha, sedangkan saat ini luasnya hanya sekitar 900×10^6 ha. Amerika Latin dan Asia telah kehilangan telah kehilangan sekitar 40% tutupan hutan aslinya. Dan Afrika hampir 50%. Sebagian besar kehilangan ini terjadi selama dua hingga tiga abad terakhir. Pada awal millennium ketiga, hutan telah hilang sama sekali di 25 negara, dan hutan di 57 negara mencakup kurang dari 10% dari total luas daratan mereka. Secara historis mengubah lahan hutan menjadi lahan pertanian, peternakan, infrastruktur, industri dan perkotaan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk melakukan pembangunan juga kemajuan. Namun, interaksi antara manusia dengan hutan sering kali mengakibatkan konversi menjadi penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan yang menyebabkan kerugian lingkungan, social, dan ekonomi yang substansial. Selama decade terakhir, deforestasi dan degradasi hutan, sebagian besar di daerah tropis, terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Antara tahun 1980-2005, daerah tropis mengalami kehilangan tutupan hutan yang jauh lebih intensif daripada wilayah lain dengan konsentrasi deforestasi terbesar terjadi di cekungan Amazon, Asia Tenggara, dan cekungan Kongo (Shvidenko, 2008).

Deforestasi didefinisikan sebagai konversi langsung dari hutan menjadi lahan non-hutan yang disebabkan oleh manusia. The global Forest Resource Assesment (FRA) tidak membedakan hilangnya hutan secara alami dari yang disebabkan oleh dampak manusia: deforestasi didefinisikan sebagai konversi hutan ke penggunaan lahan lain atau pengurangan tutupan kanopi pohon dalam jangka panjang dibawah ambang batas minimum 10%. Kedua definisi tersebut mengacu pada perubahan jangka panjang atau permanen dari hutan menjadi non-hutan. Deforestasi tropis didorong oleh kombinasi dari pemicu langsung dan tidak langsung dari berbagai alam (social, ekologi, ekonomi, lingkungan, biofisik), yang berinteraksi satu sama lain, seringkali secara sinergis; kombinasi spesifik dari terjadinya hal tersebut bervariasi dalam suatu wilayah di dunia, menurut negara dan diseluruh wilayah didalam negara. Penggerak langsung pada dasarnya adalah aktivitas manusia ditingkat local dan secara luas dapat dikategorikan kedalam yang terkait dengan perluasan pertanian, ekstraksi kayu dan perluasan infrastruktur. Ekspansi pertanian adalah pendorong langsung paling penting dari deforestasi hampir diseluruh wilayah tropis dan termasuk perladangan berpindah padang rumput, dan program pemukiman kembali. Sebagai contoh, di Amazon Brazil diatas 80% deforestasi terjadi dijalur 100km disepanjang jalan utama. Selama beberapa decade terakhir, kebakaran hutan telah diakui sebagai actor baru deforestasi dan degradasi didaerah tropis, sebagai aturan mengikuti perubahan penggunaan lahan dan fragmentasi tutupan hutan. Kebakaran yang luar biasa yang terjadi di Asia Selatan dan Amazon pada tahun 1997-1998 dipicu oleh kekeringan parah

akibat peristiwa El Nino. Pemicu lain dapat menjadi penting diberbagai wilayah di dunia. Seperti kerusakan serangga, drainase atau bentuk lain dari perubahan lahan basah, kerusakan lapisan es dan lintang tinggi, dan lain-lain (Shvidenko, 2008).

Pemicu tidak langsung deforestasi disebabkan oleh proses social mendasar yang biasanya diungkapkan sebagai interaksi yang terjadi dari factor-faktor alam yang berbeda. Factor-faktor ekonomi (ex. Pertumbuhan pasar yang cepat dan penggambungan kedalam ekonomi global, komersialisasi, urbanisasi dan industrialisasi, pertumbuhan permintaan barang-barang konsumsi terkait hutan, kemiskinan, dan lain-lain) sangatlah penting dibanyak wilayah tropis. Factor kelembagaan (pajak, subsidi, korupsi, hak milik, dan lain-lain) sering dikaitkan dengan penggerak ekonomi.

Konsekuensi ekologis utama dari deforestasi adalah penurunan keanekaragaman hayati, invasi spesies eksotism perusakan siklus hidrologi, peningkatan limpasan air dan penurunan kualitas air, dan percepatan erosi tanah. Hutan tropis mengandung antara 70%-90% dari semua spesies dunia, dan sebagai akibat dari deforestasi, planet ini kehilangan antara 50-130 spesies hewan dan tumbuhan setiap hari. Deforestasi juga berdampak pada limpasan dan siklus hidrologi yang mengancam sekitar 2000 spesies yang dikenal di perairan Cekungan Amazon – 10 kali lipat jumlah yang ditemukan di Eropa. Pembukaan lahan di hutan tropis juga secara substansial berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Sekitar 80% tanah didaerah tropis yang lembab bersifat asam dan tidak subur.

Penurunan tutupan hutan mengubah system iklim regional dan berpotensi global dengan mempengaruhi aliran energi permukaan, air, dan gas rumah kaca. Deforestasi di hutan beriklim sedang dan boreal memiliki efek pendinginan pada iklim dekat permukaan dengan meningkatkan albedo permukaan karena ladang yang dibudidayakan umumnya memiliki albedo permukaan yang lebih tinggi daripada hutan alam. Sedangkan di daerah tropis, deforestasi umumnya mengarah pada dimana efek yang berlaku adalah penurunan evapotranspirasi karena kekasaran permukaan yang lebih rendah dan zona permukaan yang lebih rendah dan zona perakaran yang lebih dangkal. Penurunan fluks panas laten menunjukkan pemanasan. Perubahan evapotranspirasi dan fluks panas sensible berdampak pada atmosfer tingkat rendah, dan sirkulasi atmosfer skala global (Shvidenko, 2008).

2.2.3 Keamanan Non-Tradisional

Kajian keamanan internasional dalam studi hubungan internasional telah berlangsung sejak lama. Berakhirnya perang dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca perang dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok barat dan blok timur. Namun kini definisi keamanan meliputi pula soal-soal ekonomi pembangunan, lingkungan, hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik berbagai masalah social lainnya. Pasca perang dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau Kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada

keamanan untuk masyarakat. Ini berarti masalah yang dahulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan Kerjasama kolektif dalam rangka mengatasinya. Lebih lanjut, banyaknya permasalahan yang terjadi saat ini, juga dibarengi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, memperlihatkan bahwa saat ini keamanan telah berkembang sedemikian rupa seiring dengan proses peradaban manusia. Akibatnya, penyelesaian keamanan yang hanya mengedepankan kekuatan militer hanya memberikan keamanan bagi Sebagian orang saja, sementara disisi lain banyak juga yang merasa terancam dan ketakutan. Melihat hal tersebut maka konsep mengenai keamanan masih menjadi sebuah perdebatan (*contested concept*) karena memiliki definisi yang berbeda bagi setiap actor. Hal tersebut terjadi karena konsep keamanan semakin luas juga di dorong meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya hubungan antar bangsa (international relations) dalam era globalisasi (Perwita & Yani, 2017).

Dari berbagai macam literatur, para penstudi hubungan international berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah "*contested concept*" atau masih menjadi sebuah perdebatan. Secara tradisional, konsep keamanan selama ini memang hanya menekankan pada ancaman yang bersifat militer saja dan focus pada aspek negara. Dalam konteks ini, bahasan mengenai ancaman keamanan baik tradisional maupun non-tradisional mengacu pada definisi ancaman terhadap keamanan. Richard Ullman misalnya, mendefinisikan ancaman keamanan sebagai berikut:

“...a threat to national security is an action or sequence of event that (1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state, or (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available to the government of a state or to private, non-governmental entities (persons, groups, corporations) within the state.”

“...ancaman terhadap keamanan nasional adalah tindakan atau rangkaian peristiwa yang (1) mengancam secara drastis dan dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara, atau (2) mengancam secara signifikan untuk mempersempit jangkauan pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah negara bagian atau swasta, entitas non-pemerintah (orang, kelompok, perusahaan) di dalam negara.”

(Ullman, 2016)

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut Barry Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Maka dari itu diperlukan Tindakan untuk itu menangani isu tersebut sesegera mungkin dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Kemudian Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi sesuai dengan kriteria isu keamanan yakni politik, militer, ekonomi, social, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda. Kemudian analisis mengenai keamanan memerlukan cara pandang yang menempatkan negara dan system pada sebuah hubungan timbal balik

yang saling menguntungkan dimana Sebagian terbentuk dengan sendirinya dan Sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif juga sengit. Lingkungan domestic dan dinamika internasional keduanya merupakan hal penting bagi analisis keamanan dalam upaya memahami hubungan yang kompleks diantara keduanya.

Dari paparan diatas, memperlihatkan bahwa adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non-tradisional juga actor yang terlibat juga beragam (non-state) yang dimana hal tersebut terlihat dari dinamika interaksi antar sector dan actor keamanan. Dalam perkembangan berikutnya, Barry Buzan, Waever dan de Wilde mengkonseptualisasikan keamanan sebagai sesuatu yang harus “...staged as existential threats a referent object by securitizing actor who thereby generates endorsement of emergency measures beyond rules that would otherwise bind.” (dipentaskan sebagai ancaman eksistensial sebagai objek rujukan dengan melakukan sekuritisasi aktor yang dengan demikian menghasilkan dukungan tindakan darurat di luar aturan yang seharusnya mengikat). Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa sekuritisasi pada dasarnya meliputi masalah-masalah keamanan yang tidak saja diangkat menjadi agenda politik. Selain itu isu-isu keamanan yang memperoleh status “*existential threat*” menuntut adanya upaya-upaya Tindakan nyata yang begitu besar untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan yang dihadapi para “*referent actor*” (Perwita & Yani, 2017).

Dalam memahami konsep keamanan, hal yang paling utama perlu diketahui adalah “*the origin of threats*”. Jika pada masa perang dingin,

ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar atau eksternal sebuah negara maka pada hari ini, ancaman dapat berasal dari lingkungan domestic dan global. Dalam hal ini ancaman yang berasal dari dalam negeri. Lalu dimensi kedua adalah "*the nature of threats*". Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikian persoalan mengenai keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek yang lain seperti ekonomi, social-budaya, lingkungan hidup, bahkan isu lain seperti demokratisasi dan HAM. Alhasil, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Chalk, fenomena global kontemporer diwarnai oleh "fenomena abu-abu". Fenomena ini dapat didefinisikan sebagai ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional, dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi actor negara dan non-negara. Maka akibat yang timbul pun beragam, mulai dari degradasi lingkungan, konflik SARA, isu ekonomi, dan lain-lain. Mengemukanya berbagai macam isu sebagai sifat-sifat baru ancaman berkorelasi amat kuat dengan dimensi ketiga yakni "*changing response*". Jika biasanya respon yang muncul adalah Tindakan kekerasan dan juga melibatkan militer, maka kini isu-isu tersebut perlu juga diatasi dengan pendekatan-pendekatan non-militer. Kemudian deminesi yang juga akan mengarahkan pada pentingnya perluasan penekanan pada keamanan non-tradisional adalah "*changing responsibility of security*". Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah "organisasi politik" terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan

bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan “baru” menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan “*human security*” merupakan agenda pokok dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar semua individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan ditentukan juga oleh kerjasama transnasional antara actor non-negara. Dan dimensi yang terakhir “*core values of security*”. Berbeda dengan para kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada “*national independence*”, kedaulatan dan integritas teritorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini antara lain perlindungan terhadap HAM, perlindungan terhadap lingkungan hidup, upaya memerangi kejahatan lintas batas, dan lain-lain. Perlindungan terhadap nilai-nilai baru tersebut menjadi puncak semakin mengemukanya keamanan non-tradisional dalam konteks global kini. Mengemukanya berbagai konflik komunal yang terjadi disekitar, tidak dapat dilepaskan dari dua persoalan besar: perkembangan yang terjadi dalam dunia internasional (globalisasi) dan semangat partikularisme domestic dan transnasional (yang bisa jadi merupakan “*reaction against globalization*”). Globalisasi telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok dan system social yang melewati dan atau bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*). Dengan demikian, globalisasi memunculkan actor-aktor baru. (Perwita & Yani, 2017).

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa globalisasi telah memperluas lingkup ancaman yang terjadi dalam studi hubungan internasional serta memunculkan actor-aktor baru. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh UNDP yang berorientasi terhadap keamanan manusia dengan judul *Dimensions of Human Security* mengatakan bahwa terdapat tujuh ancaman yang berkaitan dengan keamanan manusia. Hal tersebut meliputi ancaman makanan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, komunitas, personal dan politik. Keamanan ekonomi merupakan bagian dari keamanan manusia dan keduanya saling berkaitan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, suatu negara melakukan aktivitas ekonomi. Namun, aktivitas ekonomi yang dilakukan sering kali memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan karena ekonomi yang dibangun tidak bersandar pada ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi semakin bertambah sejalan dengan bertambahnya juga jumlah populasi manusia. Guna memenuhi kebutuhan, manusia terus mengeruk/mengeksploitasi sumber daya dan melakukan peningkatan aktivitas produksi (Sayyidati, 2017). Ekonomi liberal yang banyak dianut oleh negara-negara saat ini membuka gerbang perdagangan lintas batas dengan selebar-lebarnya dan melanggengkan produksi yang berlebihan yang dilakukan oleh industri. Hal tersebut menyebabkan masyarakat saat ini sangat konsumtif. tujuan dari dilakukannya perdagangan bebas adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan sebesar-besarnya dan mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Aktivitas industri yang terjadi hari ini memiliki tendensi tidak melihat dampak yang terjadi baik itu dampak social maupun lingkungan.

Ekonomi liberal sebagai bentuk dari sebuah ekonomi yang banyak diadopsi oleh banyak negara telah gagal dan melihat kenyataan bahwa peningkatan serta pertumbuhan produksi juga konsumsi telah memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Serta meledaknya jumlah populasi tidak sejalan dengan sumber daya yang ada padahal level konsumsi terus mengalami peningkatan dan banyak negara-negara berkembang juga telah bergerak kearah gaya hidup yang konsumtif (Mesjasz et al., 2008).

Hal inilah yang menjadi sebuah paradox atau sesuatu yang berlawanan dalam isu lingkungan. Sebuah fakta, bahwa aya hidup saat ini telah menyebabkan permasalahan bagi lingkungan. Hal tersebut memicu munculnya sebuah dilemma, membiarkan struktur global berubah dengan perlahan atau perubahan tersebut secara tiba-tiba karena terjadinya krisis lingkungan (Trombetta, 2008). Dampak buruk yang diterima oleh lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi menjadi sebuah tantangan yang baru dalam studi hubungan internasional. Sebagai salah satu isu yang berkembang dengan berbagai kompleksitas aktivitas ekonomi yang ada, manusia mencoba untuk menjaga, merawat dan mempertahankan lingkungan demi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Munculnya isu lingkungan sebagai isu global mendapatkan banyak perhatian. Mereka yang concern terhadap isu lingkungan telah memunculkan sebuah tema mengenai degradasi lingkungan sebagai sebuah ancaman yang bagi keberlangsungan hidup manusia yang sangat nyata. Karena hal tersebut, masyarakat internasional mengambil Langkah-langkah

strategis untuk menyelamatkan lingkungan. Yang mereka lakukan merupakan usaha sekuritisasi lingkungan.

Sekuritisasi lingkungan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjaga serta mempertahankan biosfer dan lingkungan local yang ada di muka bumi. Isu lingkungan memunculkan actor-aktor baru seperti para kelompok epistemic, organisasi internasional, Gerakan social, juga pemerintah. Mereka yang terlibat dalam aktivitas sekuritisasi lingkungan menggagendakan aktivitasnya dalam sebuah agenda baik itu agenda ilmiah maupun agenda politik. Agenda yang bersifat ilmiah dibentuk diluar jangkauan politik dan dibentuk oleh para ilmuwan serta institusi yang bergerak dibidang permasalahan lingkungan. Disisi yang lain, agenda politik berisi tentang pengambilan keputusan juga kebijakan-kebijakan yang berkorelasi dengan pengaturan dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Setiap agenda yang ada memiliki perannya masing-masing. Agenda ilmiah memaparkan ancaman yang terdapat dalam masalah lingkungan yang kemudian memunculkan sebuah tindakan sekuritisasi atau desekuritisasi. Sedangkan agenda politik membawa perhatian public kemudian mencari cara untuk menghadapi isu yang ditampilkan. Kedua agenda tersebut merupakan agenda yang saling berhubungan namun melalui proses penggodokan dan pembahasan yang berbeda. Agenda ilmiah perlu memperhatikan aspek-aspek akademis, sedangkan agenda politik perlu memperhatikan aspek dan poin dari pandangan pemerintah itu sendiri, masyarakat, juga media. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pertemuan tingkat internasional yang digelar guna membahas bagaimana cara serta

strategi yang efektif dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan degradasi lingkungan. Dalam forum tersebut, negara-negara dunia ketiga biasanya membawa fakta-fakta bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi memberikan dampak negative terutama yang paling rentan terdampak adalah mereka yang berada dibelahan bumi bagian selatan. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan dari mereka masih bergantung pada sumber daya alam, seperti bidang kelautan, maupun pertanian (Barnett & Adger, 2007). Sikap yang mereka tunjukkan merupakan cara untuk memperlihatkan bahwa negara-negara industri harus bertanggung jawab dalam mengontrol gas rumah kaca. Namun pandangan seperti ini hanya membatasi strategi guna menghadapi permasalahan lingkungan. Tanggung jawab untuk mengontrol gas rumah kaca bukan hanya menjadi tanggung jawab negara industri saja, namun seluruh masyarakat internasional. Karena permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua pihak saja namun dibutuhkan kerjasama kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.

2.2.4 Kebijakan Ekonomi Hijau Brazil

Brazil merupakan negara terbesar kelima (8,5 juta km²) dan bisa dikatakan merupakan negara yang paling memiliki keanekaragaman hayati. Ekonominya terdiversifikasi dengan kegiatan pertanian, industri, dan jasa. Lebih dari 84% populasi tinggal di daerah perkotaan (menurut sensus demografis pada tahun 2010) tetapi negara ini memiliki wilayah hutan tropis terluas di dunia. Oleh sebab itu, Brazil menghadapi berbagai masalah lingkungan, percampuran dari masalah yang khas yang dimiliki oleh negara maju yang berkaitan dengan

tingginya tingkat urbanisasi, limbah, dan polusi industri, dan masalah yang dimiliki oleh negara berkembang seperti deforestasi dan sanitasi yang buruk.

Solusi ekonomi hijau – dipahami sebagai solusi yang dapat menghasilkan “peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan social, sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan”. Hal tersebut merepresentasikan kesempatan yang baik bagi negara untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan masalah berkelanjutan. Melalui hal tersebut mereka menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi hijau dapat menghadirkan solusi potensial menuju keberlanjutan, dengan bobot lebih untuk institusi yang “bertindak secara local”, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Prinsip utamanya adalah bahwa kebijakan lingkungan tidak boleh dilihat sebagai pembatasan yang diberlakukan oleh birokrasi negara atau tekanan dari aktivis lingkungan radikal (Eduardo & Oung, 2013).

Dalam beberapa decade terakhir, ekonomi Brazil telah mengalami perubahan dari kondisi tingkat pertumbuhan yang rendah dan inflasi yang sangat tinggi kemudian menjadi contoh sukses pasar negara berkembang. Namun ledakan aktivitas ekonomi dan investasi disertai dengan perubahan structural dalam komposisi PDB dan ekspornya dengan meningkatkan spesialisasi ekspor bahan mentah atau produk yang intensif pada sumber daya alam dan energi. Tidak mengherankan aktivitas yang terjadi berpotensi menghasilkan polusi yang lebih tinggi dan meningkatkan porsi aktivitas karbon dalam struktur ekspor Brazil. Masalah yang terkait dengan spesialisasi komoditas tersebut tidak terbatas pada dimensi lingkungan. Dari sudut pandang social, model ekonomi yang didasarkan pada aktivitas ekstraksi atau penambangan memperkuat eksklusivitas, karena manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi dalam kelompok yang relative kecil, sementara degradasi lingkungan memiliki dampak yang sangat buruk. Sebagai contoh adalah

perluasan wilayah pertanian melalui deforestasi: dimana manfaat diberikan kepada mereka yang berada diposisi atas rantai agribisnis, namun hal tersebut juga mengorbankan ketidakseimbangan social yang serius seperti pengusuran masyarakat adat, masalah kesehatan yang ditimbulkan dari udara yang disebabkan oleh pembakaran hutan dalam proses pembukaan lahan, dan lain sebagainya. Maka dari itu ekonomi hijau membutuhkan paradigma kompetitif baru, dan bisnis sangat berperan kedalam transisi kearah yang lebih hijau.

Kunci dari transisi adalah inovasi, dimana menurut Schumpeter: produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber baru penyedia bahan baku dan input lainnya, dan struktur pasar baru (Schumpeter, 1976). Studi empiris untuk industri Brazil menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistic antara perusahaan yang memiliki keprihatinan terhadap lingkungan dengan mereka yang paling mungkin untuk mengadopsi atau menghasilkan inovasi. Mereka yang menghasilkan inovasi lebih cenderung menjadi “hijau”, menciptakan sinergi penting, antara inovasi dan kebijakan lingkungan. Transisi menuju ekonomi hijau ini membutuhkan partisipasi aktif dari sector public pada berbagai tingkat regulasi: 1. Ekonomi makro (fiscal dan moneter), 2, regulasi industri, 3. Pembiayaan. Perubahan pada setiap tingkat ini dibutuhkan untuk mempromosikan kebijakan ekonomi hijau secara berkelanjutan. Brazil sendiri telah memainkan peran yang cukup penting dalam mempromosikan komitmen lingkungan di tingkat internasional, yakni salah satunya menjadi tuan rumah konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 1992 dan 2012. Kemudian pada tahun 2008, the National Plan on Climate Change diluncurkan yang dimana kemudian mendorong praktik produksi yang lebih baik melalui penggunaan sumber daya alam, manusia, teknologi dan ilmiah yang lebih efisien, mempromosikan difusi bahan bakar nabatim menghilangkan hilangnya tutupan hutan [ada tahun 2015, dan

meningkatkan efisiensi energi dan penyebaran yang lebih besar dari sumber energi terbarukan (Network, 2017). Kemudian terkait dengan target mitigasi perubahan iklim, pada tahun 2009, Brazil menetapkan target sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca antara 36,1 dan 38,9 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan BAU atau 6 hingga 10 persen dibandingkan dengan tingkat tahun 2005 (Sopher et al., 2013). Kemandirian dan keamanan energi telah menjadi factor penting dalam kebijakn energi sejak tahun 1950-an. Beberapa kebijakan nasional yang bertujuan untuk menghidjaukan sector ketenagalistrikan Brazil telah diluncurkan, seperti the Alternative Energy Source Incentive Programme (PROINFA), the National Energy Conservation Programme (PROCEL), the National Programme for the Rational Use of Oil and Natural Gas, the National Biodiesel Production and Usage Programme (PNBP) (Network, 2017). Kemudian, the Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon (PPCDAM) yang diadopsi pada tahun 2003 mengkoordinasikan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi di Amazon. Keputusan ini diperkuat melalui keputusan 6321/07 dan peluncuran Amazon Fund pada tahun 2007 yang memperkenalkan program REDD nasional pertama berdasarkan pendanaan hibah daripada mekanisme pasar (Sopher et al., 2013). Tujuan jangka panjang dari program PPCDAM adalah untuk mengurangi laju deforestasi tahunan sebesar 80% pada tahun 2020. Brazil juga secara progresif menghubungkan perlindungan lingkungan dengan upaya yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan social-ekonomi. Terutama Bolsa Verde Environmental Conservation Support Programme yang diluncurkan pada tahun 2011 dalam kerangka inisiatif pengentasan kemiskinan Brazil Sem Miséria, mendorong keluarga berpenghasilan rendah untuk mengejar mata pencaharian yang ramah lingkungan. Lalu, upaya untuk ekonomi hijau juga dilakukan di tingkat daerah dan kota. Seperti contoh, program ekonomi hijau lintas sector yang dilaksanakan di negara bagian São Paulo yang mengoordinasikan

upaya yang bertujuan untuk mendorong investasi dan meningkatkan modal untuk memungkinkan pengembangan dan adopsi teknologi hijau (Network, 2017).

2.2.5 Industri Peternakan di Brazil

Produksi dan perdagangan komoditas pertanian seperti kedelai, kelapa sawit, kopi, kakao dan daging sapi menjadi pendorong utama mata pencaharian dan pembangunan local (Richards et al., 2015). Namun hal tersebut juga berkaitan dengan tantangan social dan lingkungan yang mendalam. Produksi komoditas menyebabkan hampir sepertiga hilangnya hutan global, lebih dari 20% emisi gas rumah kaca global merupakan pendorong utama penurunan keanekaragaman hayati dan juga berkaitan dengan permasalahan perampasan tanah dan kerja paksa (Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, 2013). Tata Kelola rantai pasokan komoditas yang berkelanjutan menjadi sebuah tantangan, paling tidak karena sering terjadi pemutusan spasial antara tempat produksi dan konsumsi. Komoditas diperdagangkan dan diproses disepanjang rantai pasokan yang kompleks yang memindahkan produk dari produsen melalui berbagai tahapan, mulai dari pengolah, pedagang, perusahaan logistic, dan pengecer sebelum akhirnya mencapai konsumen.

Brazil merupakan produsen daging sapi terbesar kedua didunia, dengan 2,5 juta petani mengoperasikan sebagian besar system produksi berbasis padang rumput dimana 87-90% ternak diselesaikan di padang rumput dan sekitar 10-13% selesai di feedlots. Sector tersebut juga memiliki dampak terhadap lingkungan, yang utama adalah pendorong deforestasi. Dua pertiga lahan yang dibuka di bioma Amazon dan Cerado telah diubah menjadi padang rumput ternak, membuat sector peternakan Brazil bertanggung jawab atas seperlima dari semua emisi dari

deforestasi yang didorong oleh komoditas diseluruh daerah tropis. Namun Brazil mempromosikan peternakan berkelanjutan yang didasarkan pada komitmen untuk terus memenuhi permintaan daging sapi sambil dengan berani dan proaktif menangani masalah lingkungan utama yang secara tradisional dikaitkan dengan industri ini. Deforestasi, emisi gas rumah kaca, degradasi padang rumput, penggunaan air dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi masalah yang selalu dikutip (Zu Ermgassen et al., 2020).

Masyarakat Brazil pada dasarnya merupakan seorang individu yang gemar mengkonsumsi daging. Konsumsi daging ayam dan sapi di Brazil menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Maka tak mengherankan bahwa industri peternakan di Brazil berkembang dengan sangat cepat (Aria, 2019). Produksi ternak di Brazil memegang peranan yang sangat besar dalam memenuhi permintaan makanan bergizi dan juga untuk ketahanan pangan (GTPS, 2007).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada, identifikasi, serta rumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

“Permintaan terhadap produk sapi Brazil mengalami peningkatan/semakin meningkat, maka deforestasi dan degradasi di hutan hujan Amazon juga akan semakin meningkat.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas:</p> <p>Jika permintaan terhadap produk sapi Brazil semakin meningkat.</p>	<p>Permintaan terhadap produk-produk sapi asal Brazil selalu mengalami peningkatan. Bukan hanya untuk memenuhi permintaan negara-negara yang menjadi importir produk-produk sapi Brazil, namun juga guna memenuhi konsumsi domestic.</p>	<p>Data mengenai ekspor produk peternakan (sapi):</p> <p>DownloadReportByFileName (usda.gov)</p> <p>DownloadReportByFileName (usda.gov)</p>

<p>Variabel terikat:</p> <p>Maka deforestasi di hutan hujan amazon juga semakin meningkat.</p>	<p>Deforestasi dan degradasi hutan hujan amazon setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.</p>	<p>Data mengenai deforestasi yang terjadi di hutan hujan Amazon Brazil:</p> <p>Brazil Deforestation Rates & Statistics GFW (globalforestwatch.org)</p>
--	---	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

